

UPAYA ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE DALAM MENANGANI KONFLIK DI UKRAINA TIMUR

Muhammad Dedy Yanuar dan Ali Muhammad
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55184
dedyyanuar99@gmail.com
alimuhammad@umy.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan meneropong peran *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dalam menangani krisis di Ukraina Timur pada tahun 2014. Setelah jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang pro-Rusia tahun 2014, Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea secara ilegal. Aneksasi ilegal terhadap Krimea itu kemudian diikuti dengan pecahnya konflik bersenjata antara pihak separatist pro-Rusia dengan pihak pemerintah di wilayah Ukraina Timur. Konflik berlarut-larut karena Rusia melakukan intervensi dengan mendukung pihak pemberontak. Bagaimana upaya OSCE dalam menangani krisis tersebut? Artikel ini menunjukkan bahwa OSCE berperan strategis dalam merespon krisis tersebut. *Pertama*, OSCE berusaha untuk menjembatani dan meredakan ketegangan dengan melibatkan kedua negara yang sedang berkonflik melalui wadah dialog yang bersifat komprehensif. *Kedua*, OSCE mengirimkan Misi Pemantauan Khusus untuk memonitor dinamika krisis di Ukraina Timur secara intensif. *Ketiga*, OSCE melaksanakan Misi Penilaian Hak Asasi Minoritas guna melindungi kaum minoritas nasional di Ukraina. *Keempat*, OSCE juga menciptakan *Interparliamentary Liaison Assembly* melalui organ *Parliamentary Assembly* untuk mempromosikan dialog terbuka dan komprehensif antarnegara agar dapat terjadi de-eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Kata kunci: OSCE, *cooperative security*, krisis, Krimea, Ukraina Timur, Rusia

Abstract

This article examines the role of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in handling the crisis in Eastern Ukraine in 2014. After the fall of pro-Russian Ukrainian President Viktor Yanukovych in 2014, Russia illegally annexed Crimea. The annexation was followed by the outbreak of armed conflict between pro-Russian separatist parties and the Ukrainian government in the Eastern Ukraine region. The conflict became protracted as Russia intervened in favor of the rebels. How was the OSCE's effort in handling the crisis? This article shows that the OSCE has played a strategic role in responding to the crisis. First, the OSCE sought to bridge and alleviate tensions by engaging both conflicting parties through a comprehensive dialogue framework. Secondly, the OSCE sent a Special Monitoring Mission to intensively monitor the dynamics of the crisis in Eastern Ukraine. Thirdly, the OSCE implemented the Minority Rights Assessment Mission to protect national minorities in Ukraine. Fourthly, the OSCE also created the Interparliamentary Liaison Assembly to promote an open and

comprehensive dialogue between countries to enable the de-escalation of conflicts in the region.

Keywords: OSCE, cooperative security, crisis, Crimea, Eastern Ukraine, Russia

Pendahuluan

Artikel ini akan meneropong peran *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dalam menangani konflik bersenjata di Ukraina Timur. Setelah jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang pro-Rusia tahun 2014, negara tetangganya (Rusia) menganeksasi Krimea yang merupakan wilayah Ukraina secara ilegal. Peristiwa aneksasi itu juga diikuti dengan meluasnya konflik bersenjata di Ukraina Timur antara pihak pemberontak yang didukung Rusia dengan pihak pemerintah.

Bagaimana upaya OSCE dalam menangani krisis di Ukraina Timur tersebut? Perlu dicatat bahwa OSCE merupakan organisasi kerja sama keamanan antarpemerintah di Eropa dan Amerika Utara yang awalnya bernama *Conference on Security and Co-operation in Europe* (CSCE). CSCE didirikan pada tanggal 1 Agustus 1975 di Helsinki, Finlandia. CSCE berganti nama menjadi *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) pada pertemuan puncak kepala pemerintahan negara di Budapest tahun 1994. OSCE merupakan salah satu

wadah organisasi keamanan regional terbesar di dunia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan memfokuskan pada isu keamanan secara komprehensif, meliputi masalah pengawasaan senjata, langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, hak asasi manusia, kaum minoritas, demokratisasi, kebijakan strategi, anti-terorisme, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. OSCE bukan merupakan sebuah aliansi militer, melainkan lebih menekankan pada penyelesaian berbagai masalah keamanan melalui dialog terbuka dan komprehensif yang bersifat kooperatif dan inklusif. Sebagai salah satu organisasi keamanan regional terbesar di dunia, OSCE memiliki 57 negara anggota yang berasal dari Eropa, Asia Tengah, dan Amerika Utara. Dalam rangka menjaga kestabilan dan keamanan di dunia, OSCE memiliki tiga tujuan besar, antara lain: dimensi politik-militer, dimensi ekonomi dan lingkungan, dan dimensi manusia (OSCE, t.thn.).

Tulisan ini menunjukkan bahwa OSCE berperan strategis dalam merespon krisis di Ukraina. *Pertama*, OSCE berusaha untuk menjembatani dan

meredakan ketegangan dengan melibatkan kedua negara yang sedang berkonflik melalui wadah dialog yang bersifat komprehensif. *Kedua*, OSCE mengirimkan Misi Pemantauan Khusus untuk memonitor dinamika krisis di Ukraina Timur secara intensif. *Ketiga*, OSCE melaksanakan Misi Penilaian Hak Asasi Minoritas guna melindungi kaum Minoritas Nasional di Ukraina. *Keempat*, OSCE juga menciptakan *Inter-parliamentary Liaison Assembly* melalui organ *Parliamentary Assembly* untuk mempromosikan dialog terbuka dan komprehensif antarnegara agar dapat terjadi de-eskalasi konflik di wilayah tersebut. Namun demikian, dalam upaya meredakan ketegangan tersebut, OSCE masih menemui berbagai hambatan di lapangan akibat ketegangan hubungan bilateral antara Ukraina dan Rusia.

Instabilitas Politik di Ukraina

Konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina Timur berawal dari gelombang demonstrasi rakyat melawan Presiden Yanukovych yang pro-Rusia sejak awal tahun 2014. Pemicu gelombang protes rakyat tersebut adalah keputusan Presiden Yanukovich untuk tidak menandatangani kerja sama ekonomi yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Presiden Yanukovich justru menandatangani kesepakatan kerja sama

ekonomi dengan Rusia yang berisikan komitmen Rusia untuk segera melakukan investasi sebanyak puluhan miliar dollar AS di Ukraina. Akhirnya, keputusan yang diambil oleh Presiden Yanukovych untuk melakukan kesepakatan kerja sama ekonomi dengan Rusia tersebut memicu aksi protes rakyat besar-besaran terhadap Pemerintah Ukraina. Demonstrasi besar-besaran ini akhirnya mengakibatkan tumbangannya pemerintahan Yanukovich (Aljazeera, 2014).

Setelah pemerintahan Ukraina yang dipimpin oleh Yanukovych terguling, Petro Poroshenko yang pro-Barat dilantik sebagai presiden yang baru. Pada rezim baru ini, Ukraina memilih untuk bersikap pro-Barat dan Uni Eropa serta menunjukkan sikap represif dengan melarang penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di Ukraina Timur. Hal tersebut mendapat kecaman dari Rusia dan masyarakat yang tidak menyetujui sikap tersebut, khususnya dalam hal kerja sama dengan Uni Eropa dan negara-negara Barat. Pihak-pihak yang tidak menyetujui adalah masyarakat pro-Rusia yang bertempat tinggal di wilayah Krimea, Ukraina Timur atau Selatan. Pihak masyarakat yang bersikap pro-Rusia di Krimea tersebut melakukan demonstrasi sebagai wujud atas rasa kekecewaan terhadap Presiden Poroshenko yang

sangat kooperatif dengan pihak Barat dan Uni Eropa (Aljazeera, 2014).

Kemudian, berbagai aksi protes membesar dan berubah menjadi gerakan separatisme pro-Rusia, dimulai di wilayah Krimea. Krimea adalah sebuah wilayah otonom Ukraina yang dihuni oleh penduduk yang mayoritas merupakan keturunan Rusia dan berbahasa Rusia. Lalu, keinginan dari gerakan separatist pro-Rusia di Krimea semakin kuat untuk melakukan pemisahan wilayah. Karena alasan ekonomi, strategis, maupun etnis, Rusia secara mengejutkan melakukan aneksasi atas wilayah Krimea. Aneksasi tersebut dikecam dan dipandang sebagai tindakan ilegal oleh pihak Barat.

Setelah aneksasi Krimea tersebut, Rusia mengadakan referendum untuk “melegalkan” tindakannya. Hasil referendum yang disponsori Rusia tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 95% warga Krimea memilih berpisah dengan Ukraina dan bergabung bersama Rusia. Kini, Krimea yang terletak di wilayah selatan Ukraina telah bergabung “secara resmi” ke dalam wilayah Federasi Rusia pada tanggal 17 Maret 2015 (Aljazeera, 2015). Tindakan tersebut dikecam oleh pihak barat karena dianggap ilegal dan sepihak.

Intervensi Rusia di Ukraina Timur

Setelah Krimea “resmi” dikuasai oleh Rusia, gerakan separatist pro-Rusia meluas sampai wilayah-wilayah di Ukraina sebelah Timur yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia. Gerakan separatist meluas ke wilayah Donetsk dan Luhansk yang secara geografis terletak dekat dengan perbatasan Rusia sehingga pada bulan April 2014, wilayah administrasi Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur berhasil dikuasai oleh gerakan separatist pro-Rusia dengan ambisi untuk menjaga keamanan dan keselamatan penduduk Donetsk dan Luhansk yang secara mayoritas berkebangsaan Rusia tersebut (BBC Indonesia, 2015). Pemerintah Ukraina kemudian mengirimkan pasukan militernya ke wilayah Ukraina Timur untuk mempertahankan integritas teritorial negaranya agar tidak jatuh ke tangan pemberontak pro-Rusia. Pertempuran militer yang sengit antara pemerintah dan gerakan separatist pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk ini telah memakan korban lebih dari 4.800 orang (BBC Indonesia, 2015). Perlu dicatat bahwa Donetsk dan Luhansk adalah wilayah yang sangat strategis karena merupakan daerah pertambangan industri besar yang menghasilkan setidaknya 28% pendapatan negara.

Rusia menilai bahwa sikap pemerintah baru Ukraina merugikan kepentingan Rusia. Presiden Vladimir Putin menganggap bahwa pemerintahan Ukraina saat ini berada di bawah pengaruh para kaum “nasionalis radikal” yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat Rusia yang berdomisili di Ukraina Timur. Kekhawatiran Putin lainnya adalah kuatnya pengaruh negara-negara Barat serta hilangnya jaminan keselamatan penduduk yang pro-Rusia di Ukraina pasca tumbangannya pemerintahan Presiden Yanukovych. Melihat hal tersebut, akhirnya Putin mengirimkan pasukan militer Rusia ke sejumlah daerah di wilayah Ukraina Selatan dan wilayah Ukraina Timur dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Ukraina yang berkebangsaan dan berbahasa Rusia.

Itulah sebabnya Presiden Putin memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok pemberontak separatistis pro-Rusia. Presiden Putin juga disinyalir berambisi untuk mengembalikan Rusia ke masa kejayaan Uni Soviet. Aksi dari sokongan bantuan pasukan militer yang diberikan kepada gerakan separatistis pro-Rusia tersebut merupakan bagian dari upaya Rusia untuk mengamankan warga

berkebangsaan Rusia di Ukraina tersebut (BBC Indonesia, 2015).

Namun pada kenyataannya, pemberian bantuan militer tersebut digunakan oleh Rusia sebagai alat untuk mengekspansi wilayah-wilayah Ukraina. Hal tersebut terlihat dengan jatuhnya wilayah Krimea, Donetsk, dan Luhansk ke tangan masyarakat yang pro-Rusia. Selain menggunakan jalur militer untuk melakukan ekspansi wilayah ke Ukraina, Rusia juga menggunakan instrumen ekonomi, yakni ekspor gas alamnya yang melimpah untuk mengancam negara-negara di wilayah Eropa, khususnya Eropa Timur, agar stabilitas perekonomiannya terganggu (Pujayanti, 2014).

Cooperative Security dan Peran OSCE

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) adalah organisasi keamanan terbesar di dunia. Mandat organisasi ini termasuk isu kontrol persenjataan, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang adil. OSCE awalnya didirikan saat Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur pada tahun 1975 dengan nama *Conference on Security and Co-operation in Europe* (CSCE). OSCE menaruh perhatian kepada peringatan dini dan pencegahan konflik, manajemen krisis, dan

pemulihan kembali pasca krisis. Negara anggotanya berjumlah 57 negara yang berasal dari Eropa, Asia Tengah, dan Amerika Utara (Galbreath, 2007).

Dalam menjalankan perannya, OSCE menekankan gagasan *Cooperative Security* (CS), yakni suatu format kerja sama keamanan antarnegara untuk meredakan ketegangan, membangun kepercayaan, meningkatkan prospek pembangunan ekonomi, dan memelihara stabilitas dengan cara mempromosikan dialog dan konsultasi agar tercipta keamanan. Konsep CS ini pada dasarnya adalah sebuah konsep yang mengusung bagaimana menyusun hubungan atas dasar nilai-nilai bersama (*common values*) mengenai keamanan di mana setiap aktor mempunyai tanggung jawab bersama sebagai masyarakat internasional. Konsep ini juga melandaskan diri pada antisipasi ancaman, terutama eksternal, dengan jalan merangkul pihak lawan atau pihak yang dianggap mengancam (Galbreath, 2007).

Konsep CS tersebut merujuk pada pendekatan dalam mengembangkan institusi yang bersifat multilateral, terutama adanya interdependensi dalam masalah keamanan pada tingkat kawasan. Dampak dari interdependensi tersebut adalah penciptaan kondisi keamanan yang justru harus dilakukan

dengan mengajak pihak yang dianggap mengancam (lawan) untuk bekerja sama dalam penciptaan stabilitas keamanan bersama di kawasan. Kebijakan keluar yang diharapkan lebih berupa keinginan untuk menciptakan intensitas dialog keamanan diplomasi dua jalur (*two track diplomacy*), dalam arti juga melibatkan peran aktor-aktor non-negara. Pembahasan bisa bersifat militer maupun non-militer, namun penekanannya adalah pada pembahasan satu isu dalam setiap pertemuan melalui institusi multilateral. Perlu dicatat bahwa OSCE adalah sebuah organisasi keamanan yang anggotanya yang berasal dari benua Amerika Utara, Eropa, dan Asia. OSCE bertujuan untuk menciptakan stabilitas, perdamaian, dan demokrasi melalui dialog politik yang berkaitan dengan nilai-nilai bersama dan melalui usaha praktis yang dapat menyelesaikan suatu resolusi konflik untuk jangka panjang (Galbreath, 2007).

OSCE muncul sebagai pemain penting dalam Krisis Ukraina karena posisinya berada di antara Barat dan Timur. OSCE dibentuk pada tahun 1970 sebagai forum dialog antara Timur dan Barat. Setelah Perang Dingin berakhir, OSCE mengambil peran yang lebih luas dalam hal menjaga perdamaian dunia (De Britto, 2015). Sebagai organisasi yang berperan penting untuk menjaga

stabilitas keamanan regional Eropa, OSCE memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Ukraina Timur karena Ukraina adalah anggota OSCE. Rasa tanggung jawab dan kepedulian OSCE ditunjukkan dengan cara berperan aktif dalam usaha menciptakan manajemen krisis dan pencegahan konflik di Ukraina Timur. Meskipun dinamika konflik yang terjadi di wilayah Donetsk dan Luhansk di bagian timur Ukraina ini terus meningkat, Pemerintah Ukraina dan gerakan separatis pro-Rusia sepakat melaksanakan gencatan senjata yang disponsori oleh OSCE pada tanggal 1 September 2015. Gencatan senjata ini berfungsi untuk menurunkan jumlah korban yang tewas akibat konflik tersebut (VOA Indonesia, 2015). Upaya penting OSCE adalah melakukan upaya dialog keamanan dan melakukan kegiatan strategis, yakni mengirimkan misi pemantauan khusus, melakukan kegiatan verifikasi militer, mengirimkan misi penilaian hak asasi minoritas, membentuk proyek dialog nasional, dan menjadi koordinator proyek.

1. Misi Pemantauan Khusus

Pada tanggal 21 Maret 2014, semua negara anggota OSCE, termasuk Ukraina dan Rusia, berdialog dan mengambil sebuah keputusan secara

konsensus untuk melaksanakan Misi Pemantauan Khusus ke Ukraina. Kantor Pusat Misi Pemantauan Khusus OSCE ini berlokasi di Kiev. Para pemantau kemudian dikirim ke kota-kota besar di Ukraina, seperti Kherson, Odessa, Lviv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Chernivtsi, dan Luhansk (OSCE Special Monitoring Mission, 2015).

Misi tersebut beroperasi di bawah prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Misi Pemantauan Khusus bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan laporan mengenai pengamanan situasi di lapangan, merumuskan fakta-fakta yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di lapangan, dan yang paling utama adalah membantu Ukraina untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk mendorong perdamaian, stabilitas dan keamanan. Kemudian, Misi Pemantauan Khusus ke Ukraina ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Misi Pengamatan OSCE di Pos-pos Pemeriksaan Rusia di Wilayah Gukovo dan Donetsk (*OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk*) dan Misi Verifikasi Militer (OSCE Special Monitoring Mission, 2015).

Misi Pengamatan OSCE di Pos-pos Pemeriksaan Rusia di Wilayah

Gukovo dan Donetsk tersebut memiliki mandat untuk beroperasi di bawah prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam memantau dan melaporkan situasi dan gerakan yang melintasi perbatasan Rusia di dua pos pemeriksaan di wilayah Gukovo dan Donetsk tersebut. Misi Pengamat OSCE ini juga memiliki beberapa tugas yang dilaksanakan di pos-pos pemeriksaan Rusia di wilayah Gukovo dan Donetsk. *Pertama*, manajemen perbatasan (*border management*). *Kedua*, pencegahan dan resolusi konflik (*conflict prevention and resolution*).

Misi Pengamatan OSCE tersebut dipimpin oleh seorang kepala pemantau bernama Simon Eugster bersama dengan 16 pengamat sipil lainnya. Mereka bekerja secara bergantian (*shift*) untuk memastikan kelancaran di wilayah perbatasan Gukovo dan Donetsk tersebut selama 24 jam sehari dalam tujuh hari dalam seminggu yang didukung oleh Tim Logistik dan Administratif OSCE yang cukup memadai. Misi Pengamatan OSCE di Pos-pos Pemeriksaan Rusia di Wilayah Gukovo dan Donetsk, yang merupakan sebuah permintaan dari Pemerintah Rusia kepada OSCE dan juga telah disepakati secara konsensus oleh semua 57 negara anggota OSCE ini, mempunyai tujuan akhir, yaitu berkontribusi dalam mengurangi

ketegangan terhadap krisis di Ukraina yang terjadi saat ini (OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk, 2015).

2. Kegiatan Verifikasi Militer

Kegiatan Verifikasi Militer ini diminta oleh Ukraina hingga tanggal 20 Maret 2014 untuk menutupi bagian selatan dan timur Ukraina. Selama kunjungan-kunjungan dari Kegiatan Verifikasi Militer tersebut, sebanyak 30 negara anggota OSCE mengirimkan 56 personil militer dan warga sipil yang tidak bersenjata ke Ukraina. Kelompok tersebut telah berusaha untuk mengunjungi wilayah Krimea beberapa kali, namun tidak mampu bergerak melewati pos-pos pemeriksaan di perbatasan administrasi wilayah tersebut. Bagaimanapun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Kegiatan Verifikasi Militer tersebut menyatakan bahwa sangat sulit untuk menghilangkan masalah kekhawatiran mengenai aksi militer yang terletak di wilayah Krimea tersebut (OSCE Fact Sheet, 2015).

Sebanyak 26 negara telah memutuskan untuk mengirimkan para inspektur militer dan para pengamat berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Dokumen Wina, yaitu Austria, Belarus, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Georgia, Jerman,

Hongaria, Latvia, Lituania, Luxemburg, Moldova, Montenegro, Belanda, Polandia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Amerika Serikat, dan Inggris. Mereka telah mengadakan 25 kegiatan verifikasi di Ukraina. Sejumlah negara yang meliputi Belgia, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Latvia, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, dan Amerika Serikat telah mengadakan 11 kegiatan verifikasi militer di wilayah Federasi Rusia. Kemudian, kunjungan-kunjungan yang dilakukan di Ukraina Timur ini berupa inspeksi militer dan kegiatan verifikasi militer, sesuai dengan isi Dokumen Wina tahun 2011 yang merupakan suatu bentuk respon dan perhatian yang lebih besar dari OSCE dalam menangani krisis berkepanjangan yang terjadi di Ukraina Timur tersebut.

3. Misi Penilaian Hak Asasi Minoritas

Sejak terjadinya aneksasi terhadap wilayah Krimea yang diikuti dengan jatuhnya wilayah Donetsk dan Luhansk ke tangan gerakan separatistis pro-Rusia, banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi minoritas, khususnya di wilayah Ukraina Timur (Sasongko, 2014). Isu ini kemudian bukan hanya direspon oleh OSCE, melainkan juga oleh PBB. Sekretaris Jenderal PBB, Ban

Ki-moon, menegaskan bahwa kaum minoritas yang ada di Ukraina harus dihormati dan dilindungi (Adiladjali, 2014). Maka, untuk menanggapi hal tersebut, Ukraina meminta bantuan OSCE sebagai organisasi keamanan internasional untuk membantu melindungi hak-hak asasi manusia kaum minoritas yang ada di Ukraina, khususnya etnis Tatar Krimea yang pernah dideportasi dari Ukraina beberapa tahun yang lalu (OSCE, 2015).

Dalam rangka menanggapi permintaan dari Pemerintah Ukraina kepada OSCE pada tanggal 3 Maret 2014 mengenai Misi Penilaian Hak Asasi Manusia ke Ukraina, khususnya terkait situasi pelanggaran hak-hak asasi manusia kaum minoritas di sana, OSCE melibatkan lembaganya yang terkait akan penyelesaian masalah tersebut, yaitu Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2014).

Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional OSCE (HCNM) merupakan sebuah institusi di OSCE yang bekerja untuk mengidentifikasi dan mencari penyelesaian pertama dari ketegangan etnis yang mungkin dapat membahayakan perdamaian, stabilitas, atau hubungan persahabatan antar negara-negara anggota OSCE itu sendiri. Komisararis Tinggi sendiri sebenarnya

merupakan alat pencegahan konflik yang menggunakan pendekatan Dimensi-Silang. Tugas utamanya adalah mengingatkan kewajiban-kewajiban tiap negara terhadap hak-hak kaum minoritas di negaranya masing-masing karena sering terjadi pengabaian atau kegagalan proses untuk menghormati kaum minoritas yang sebenarnya merupakan sumber yang sangat menentukan terhadap timbulnya ketegangan etnis yang dapat menyebabkan konflik.

Kemudian, terdapat beberapa pekerjaan-pekerjaan secara umum yang dilakukan oleh Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional. *Pertama*, pendidikan dan pencegahan konflik. *Kedua*, bahasa minoritas dan mayoritas. *Ketiga*, mempromosikan partisipasi yang efektif dalam urusan publik. *Keempat*, media dan kaum minoritas. *Kelima*, menjaga ketertiban dalam masyarakat yang multietnis. *Keenam*, kaum minoritas nasional dalam hubungan antarnegara. *Ketujuh*, integrasi masyarakat. *Terakhir*, pemberian penghargaan Max van der Stoep. Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional sebenarnya telah terlibat di Ukraina sejak awal 1990-an, dengan fokus pada perundang-undangan yang mengatur hak-hak minoritas, penggunaan bahasa antaretnis di Krimea, dan pemberian pendidikan kepada kaum minoritas

nasional serta telah mendesak Pemerintah Ukraina untuk mengadakan dialog dan kompromi terkait perundang-undangan tersebut (OSCE High Commissioner on National Minorities, 2015).

Kemudian, Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional telah mendesak semua pihak untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam menghormati keutuhan wilayah Ukraina dan mencegah bentrokan antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Lalu, Komisaris Tinggi ini juga memperingatkan Pemerintah Ukraina untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam memastikan bahwa semua kepentingan kelompok etnis di Ukraina dapat terpenuhi. Bahkan, Astrid Thors sebagai Ketua Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional OSCE siap untuk memberikan saran dan memfasilitasi diskusi tentang pembentukan undang-undang baru di Ukraina yang dapat mengakomodasi kepentingan kaum minoritas nasional.

Melihat urgensi mengenai etnis minoritas di Ukraina ini, dalam konsultasinya dengan Pemerintah Ukraina pada tanggal 2-6 November 2015 yang juga dihadiri oleh para perwakilan dari kaum minoritas nasional, Thors mendesak untuk membentuk sebuah badan eksekutif

khusus di Ukraina yang memfokuskan pada pemeliharaan hak-hak asasi manusia kaum minoritas dari semua etnis yang ada di seluruh wilayah Ukraina (OSCE High Commissioner on National Minorities, 2015).

4. Proyek Dialog Nasional

Atas permintaan Ukraina pada tanggal 20 Maret 2014, OSCE juga mengerahkan sebuah tim yang terdiri dari 15 pakar internasional sebagai bagian dari sebuah Proyek Dialog Nasional untuk mengidentifikasi lebih lanjut wilayah-wilayah kegiatan OSCE untuk mendukung dalam membangun kepercayaan di antara perbedaan lapisan masyarakat di Ukraina. Tim proyek tersebut dikerahkan selama empat minggu di Odessa, Kharkiv, Luhansk, Dnepropetrovsk, Donetsk, dan Lviv. Proyek tersebut dilaksanakan oleh Koordinator Proyek OSCE dan dipimpin oleh Duta Besar Hidajet Bišćević yang berasal dari Kroasia.

Proyek tersebut membantu membuka jalan bagi sebuah inisiatif baru yang bersifat komprehensif, yaitu “Dialog Nasional untuk Reformasi, Keadilan, dan Pembangunan” yang diluncurkan pada musim semi 2015. Hal ini akan memberikan perluasan wawasan di lapangan melalui acara debat tingkat lokal dan tingkat nasional mengenai

substansi reformasi, meningkatkan pengembangan komunitas pakar mediator dan fasilitator dialog Ukraina, berusaha untuk menjamin aksesibilitas dan transparansi dari keadilan konstitusional, dan meningkatkan partisipasi warga sipil dalam mekanisme pencegahan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Proyek Dialog Nasional OSCE ini dilaksanakan oleh Koordinator Proyek OSCE di Ukraina dan dibantu oleh Majelis Parlemen OSCE yang bertujuan untuk memelihara dialog nasional tersebut di tingkat parlemen Ukraina.

5. Koordinator Proyek

Koordinator Proyek OSCE di Ukraina merupakan badan operasi lapangan yang bertugas untuk manajemen krisis dan pencegahan konflik. Pekerjaan-pekerjaan Koordinator Proyek OSCE meliputi tiga bidang utama. *Pertama*, demokratisasi dan pemerintahan yang bersih. *Kedua*, aturan hukum dan hak asasi manusia. *Ketiga*, program lintas dimensi yang terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan politik-militer.

Koordinator Proyek OSCE di Ukraina ini diberi mandat untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek-proyek dalam rangka membantu Ukraina meningkatkan keamanan negaranya dan membantu

mengembangkan legislasi, institusi-institusi, dan praktik-praktik yang sesuai dengan standar demokrasi. Tujuan utamanya adalah mendukung Ukraina dalam menyesuaikan legislasi, struktur, dan proses sebagai prasyarat dari sebuah negara demokrasi yang modern yang dibangun di lingkungan yang aman bagi rakyatnya (OSCE, 2015).

6. Majelis Parlemen

Majelis Parlemen berfungsi untuk meningkatkan partisipasi aktif terhadap seluruh negara-negara anggota OSCE dan untuk menunjukkan bagian dari proses parlemen yang memiliki hubungan erat antaranggotanya, yaitu antara negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam Majelis Parlemen ini. Kepemimpinan dan anggota Majelis Parlemen OSCE telah berperan aktif dalam menanggapi krisis di Ukraina sejak terjadinya protes massa yang dimulai pada akhir 2013. Majelis Parlemen menunjukkan partisipasi aktif yang telah terdokumentasikan dari tahun 2013 hingga 2015.

Terdapat beberapa upaya penting yang dilakukan oleh Majelis Parlemen OSCE terkait penyelesaian krisis di Ukraina Timur (OSCE Parliamentary Assembly, 2015). *Pertama*, Majelis Parlemen OSCE telah diberikan mandat untuk menciptakan sebuah

Interparliamentary Liaison Group di Ukraina untuk mempromosikan dialog dan de-eskalasi konflik. *Kedua*, Majelis Parlemen OSCE menjadi tuan rumah untuk beberapa pertemuan-pertemuan yang diadakan secara langsung antara Parlemen Ukraina dan Parlemen Federasi Rusia sejak krisis tersebut dimulai. *Ketiga*, Majelis Parlemen OSCE melaksanakan pekerjaan pengamatan pemilihan umum presiden dan pemilihan parlemen Ukraina pada tahun 2014.

Perbedaan pandangan antara Rusia dan Ukraina mengenai intervensi dan aneksasi wilayah Krimea yang dilakukan oleh Rusia, yang dianggap tidak sah oleh pemerintah baru Ukraina dan negara-negara Uni Eropa ini sebenarnya merupakan akar permasalahan yang menyebabkan krisis terus terjadi secara berkepanjangan. OSCE juga mengadakan pertemuan tiga arah (*Trilateral Contact Group*) antara perwakilan Ukraina, Rusia, dan Majelis Parlemen OSCE yang dituangkan ke dalam Protokol Minsk sebagai bentuk dari kesungguhan tiga aktor ini dalam menyelesaikan krisis di Ukraina (Haskelindos, 2015). Dari 12 poin Protokol Minsk ini, salah satu poinnya adalah melakukan dialog nasional yang inklusif antara pihak yang bertikai.

Kesimpulan

Artikel ini menganalisis peran penting *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dalam menangani krisis di Ukraina Timur 2014. Setelah jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovich yang pro-Rusia tahun 2014, Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea secara ilegal. Aneksasi ilegal terhadap Krimea itu kemudian diikuti dengan pecahnya konflik bersenjata antara pihak separatistis pro-Rusia dengan pihak pemerintah di wilayah Ukraina Timur. Konflik berlarut-larut karena Rusia melakukan intervensi dengan mendukung pihak pemberontak.

Artikel ini menunjukkan bahwa OSCE berperan strategis dalam merespon krisis tersebut. *Pertama*, OSCE berusaha untuk menjembatani dan meredakan ketegangan dengan melibatkan kedua negara yang sedang berkonflik melalui wadah dialog yang bersifat komprehensif. *Kedua*, OSCE mengirimkan Misi Pemantauan Khusus untuk memonitor dinamika krisis di Ukraina Timur secara intensif. *Ketiga*, OSCE melaksanakan Misi Penilaian Hak Asasi Minoritas guna melindungi kaum minoritas nasional di Ukraina. *Keempat*, OSCE juga menciptakan *Interparliamentary Liaison Assembly* melalui organ *Parliamentary Assembly*

untuk mempromosikan dialog terbuka dan komprehensif antarnegara agar dapat terjadi de-eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Namun demikian, dalam upaya meredakan konflik di Ukraina tersebut, OSCE masih menemui berbagai hambatan di lapangan akibat ketegangan hubungan bilateral antara Ukraina dan Rusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Bache, Ian dan Stephen George. *Politics in the European Union*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons. *Handbook Hubungan Internasional*. Jakarta: Nusa Media, 2014.
- Cohen, Richard dan Michael Mihalka. *Cooperative Security: New Horizons for International Order*. Garmisch-Partenkirchen: George C. Marshall European Center for Security Studies, 2001.
- Galbreath, David J. *The Organization for Security and Co-operation in Europe*. New York: Routledge, 2007.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sandole, Dennis J.D. *Peace and Security in the Postmodern World: The OSCE and Conflict Resolution*. New York: Routledge, 2007.

Schouten, Peer. *Theory Talks: Perbincangan Pakar Sedunia tentang Teori Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Masyarakat dan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, 2012.

Jurnal

Haskelindos, Alkurni. "Upaya Organization for Security in Europe dalam Membantu Menangani Krisis Ukraina 2013-2014". *JOM FISIP UNRI*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2015), hal 1-14.

Pujayanti, Adirini. "Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina". *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 13 (Juli 2014), hal. 5-8.

Dokumen Lain

Ischinger, Amb. Wolfgang. "Lessons Learned for the OSCE from its Engagement in Ukraine". *Interim Report and Recommendations of*

the Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project. Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project (17 Juni 2015).

Muladi. "Pemanfaatan Kerjasama Keamanan untuk Menghadapi Bahaya Keamanan Komprehensif dalam Rangka Ketahanan Nasional dan Memperkokoh NKRI". *PPRA dan PPSA Lembaga Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional (2012).

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. "Situation Assessment Report Roma in Ukraine and the Impact of the Current Crisis". *Field Assessment Visits*. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Report (29 September 2014).

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. "The Impact of the Crisis in Ukraine on its Western Regions". *Thematic Reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine*. OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (30 Maret 2015).

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. "Civil Society and the

Crisis in Ukraine”. *Thematic Reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine*. OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (11 Februari 2015).

Wahyu. *Politik Luar Negeri Rusia terhadap Ukraina dalam Kasus Crimea*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015).

Internet

Adiladjali. “Di Rusia, Ban serukan dialog yang jujur dan konstruktif antara Kiev dan Moskow”. *United Nations Information Centre Jakarta*, 21 Maret 2014. <http://unic-jakarta.org/2014/03/21/di-rusia-ban-serukan-dialog-yang-jujur-%E2%80%8B%E2%80%8Bdan-konstruktif-antara-kiev-dan-moskow/> (diakses pada tanggal 28 November 2015).

Aljazeera. Timeline: “Ukraine’s political crisis”. *Aljazeera*, 20 September 2014. <http://www.aljazeera.com/news/europe/2014/03/timeline-ukraine-political-crisis-201431143722854652.html> (diakses pada tanggal 28 November 2015).

BBC Indonesia. “Krisis Ukraina: ‘Pasukan khusus Rusia’ ditangkap”. *BBC Indonesia*, 18 Mei 2015. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150518_dunia_russia_soldiers (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).

BBC Indonesia. “Pertempuran Militer Ukraina dan Pemberontak Marak”. *BBC Indonesia*, 20 Januari 2015. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150120_ukraina_tempur_donetsk (diakses pada tanggal 28 November 2015).

BBC Indonesia. “Peta perdamaian Ukraina disepakati”. *BBC Indonesia*, 12 Februari 2015. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150212_ukraina_sepakat (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).

Berlianto. “Ukraina Wacanakan Penghapusan Hak Veto Rusia di PBB”. *Sindonews.com*, September 2015. <http://international.sindonews.com/read/1046021/41/ukraina-wacanakan-penghapusan-hak-veto-rusia-di-pbb-1442499679> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015)..

- Bima. “Standar Ganda Barat dalam Referendum di Skotlandia dan Ukraina”. *Liputan Islam*, 22 September 2014. <http://liputanislam.com/berita/standar-ganda-barat-dalam-referendum-di-skotlandia-dan-ukraina/> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- CNN Indonesia. “Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Tak Efektif”. *CNN Indonesia*, 5 September 2014. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140905174752-135-2599/gencatan-senjata-rusia-ukraina-tak-efektif/> (diakses pada tanggal 24 November 2015).
- De Britto, Johannes Sutanto. “OSCE Jadi Aktor Penting di Tengah Krisis Ukraina”. *Jaring News*, 2015. <http://jaringnews.com/internasional/uni-eropa/61410/osce-jadi-aktor-penting-di-tengah-krisis-ukraina> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- Galih, Bayu. “Dilema Ukraina, di Tengah Upaya Diplomasi dan Tuduhan AS ke Rusia”. *Kompas.com*, 6 Februari 2015. <http://internasional.kompas.com/read/2015/02/06/06170061/Dilema.Ukraina.di.Tengah.Upaya.Diplomasi.dan.Tuduhan.AS.ke.Rusia> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).
- IRIB. “Peta Jalan OSCE Selesaikan Krisis Ukraina”. *IRIB World Service*, 15 Mei 2014. <http://indonesian.irim.ir/editorial/fokus/item/80338-Peta-Jalan-OSCE-Selesaikan-Krisis-Ukraina> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).
- Liauw, Hindra. “Hampir 1.000 Tewas karena Konflik di Ukraina Timur”. *Kompas.com*, 21 November 2014. <http://internasional.kompas.com/read/2014/11/21/05040011/Hampir.1.000.Tewas.karena.Konflik.di.Ukraina.Timur> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).
- OSCE Economic and Environmental Activities. “Factsheet of the Office of the Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities”. *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/eea/30348> (diakses pada tanggal 19 November 2015).
- OSCE Forum for Security Co-operation. “Code of Conduct on Politico–Military Aspects of Security”. *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/fsc/41355>

- (diakses pada tanggal 19 November 2015).
- OSCE High Commissioner on National Minorities. "OSCE High Commissioner on National Minorities Assess Inter-Ethnic Situation In South-Eastern Ukraine". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/hcnm/198856> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE High Commissioner on National Minorities. "OSCE High Commissioner on National Minorities urges dialogue and compromise on 'divisive' language law in Ukraine". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/hcnm/92418> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk. "The OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk, Who We Are". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/om/121739> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE Parliamentary Assembly. "Ukraine: Responding to the Crisis". *OSCE Parliamentary Assembly*, 20 Mei 2015. <http://www.oscepa.org/parliamentary-diplomacy/ukraine-responding-to-the-crisis> (diakses pada tanggal 19 November 2015).
- OSCE Special Monitoring Mission. "Special Monitoring Mission, What We Do". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/ukraine-smm/117799> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE Special Monitoring Mission. "Special Monitoring Mission, Who We Are". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/ukraine-smm/117795> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE. "Factsheet on OSCE Engagement with Ukraine, OSCE Response to the crisis in and around Ukraine". *OSCE*, 1 Juni 2015. <http://www.osce.org/home/125575> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- OSCE. "Mandate of OSCE Project Coordinator in Ukraine". *OSCE*, 20 Mei 2015. <http://www.osce.org/ukraine/106005> (diakses pada tanggal 19 November 2015).

- OSCE. "What We Do". OSCE, t.thn. <http://www.osce.org/what> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2015).
- OSCE. "Who We Are". OSCE, t.thn. <http://www.osce.org/history> (diakses pada tanggal 24 Oktober 2015).
- Patnistik, Egidius. "Gencatan Senjata Ukraina Terancam". *Kompas.com*, 8 September 2014. <http://internasional.kompas.com/read/2014/09/08/12380721/Gencatan.Senjata.Ukraina.Terancam> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).
- Ratna, Heppy. "Mogherini: tak ada penyelesaian militer bagi krisis Ukraina". *Antara News*, 6 Maret 2015. <http://www.antaranews.com/berita/483677/mogherini-tak-ada-penyelesaian-militer-bagi-krisis-ukraina> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).
- Sasongko, Agung. "Rusia: Barat Tak Niat Selesaikan Krisis Ukraina". *Republika*, 29 April 2014. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/04/29/n4shim-rusia-barat-tak-niat-selesaikan-krisis-ukraina> (diakses pada tanggal 28 November 2015).
- Tuwo, Andreas Gerry. "16-1-2014: Lewat Referendum Kontroversial, Crimea Gabung Rusia". *Liputan6.com*, 16 Maret 2015. <http://news.liputan6.com/read/2191339/16-1-2014-lewat-referendum-kontroversial-crimea-gabung-rusia> (diakses pada tanggal 25 Maret 2015).
- VOA Indonesia. "Krisis Ukraina". *VOA Indonesia*, 10 Oktober 2015. <http://www.voaindonesia.com/contentinfographics/krisis-ukraina/1869046.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).
- VOA Indonesia. "Obama, Putin Akan Bahas Ukraina di New York". *VOA Indonesia*, 10 Oktober 2015. <http://www.voaindonesia.com/content/obama-putin-akan-bahas-ukraina-di-new-york/2978249.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2015).